

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad *Hukum dan Penelitian*, Cet, 1 PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Anjarsari, Pita, *Perempuan dan representasi politik*. Yogyakarta: CV Detak Pustaka, 2025.
- Arief, Hanafi. *Penemuan Hukum*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Diah, Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Fahmi, Khairul. *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Harnawansyah, M. Fadhillah. *Pemilu Legislatif Daerah, Pemerintahan Daerah, dan Dinamikanya*. Jakarta: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Maria, Linlin, dan Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram University Press, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Bandung: Nusamedia, 2020.
- Saputra, Kurniawan Eka. *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Daerah: Adaptasi dan Inovasi Pasca Kesenjangan*. Yogyakarta: Penerbit Adab, 2024.
- Saihu, Mohammad. *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, 2015.

Sholahuddin, Abdul Hakam. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sukajaya: Sada Kurnia Pustaka, 2015.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tata Kelola Keuangan Pilkada Jawa Barat 2024. Bandung: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, 2025.

B. Jurnal

Agustapa, Agustapa Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Sebagai Pelaksana Pemilu yang berintegritas dalam menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, et al. "Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 2, no. 2 (2024): 105-118.

Akbar, Muhammad Rafi Nur, Chaerul Shaleh, dan Aji Saptaji. "Implementasi Pembulatan Desimal ke Bawah Keterwakilan Perempuan di KPU Kabupaten Bandung Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 2 (2024): 1-17.

Ar Rafii, Muhammad, dan Elan Jaelani. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Keterwakilan di Legislatif." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 87-99.

Ayu, Rahma Syakira, Ananda Dewi, Nayla Febrina Putri, dan Lia Wulandari. "Dampak Sistem Pemilu terhadap Keterwakilan Politik Perempuan di PDI-P: Studi Kasus Mekanisme Pemilu dan Strategi Partai dalam Pemenuhan Kuota Gender." *ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1-12.

Ayuristian, Ivana Salsabillah, dan Baktiawan Nusanto. 2025. "Analisis Dinamika dan Perspektif Gender: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Pilihan Legislatif Tahun 2024 di DPRD Kab. Lumajang." *Triwikrama Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 9 no. 4 (2025): 1-33.

Bahri, Nabilah, Siti Atika Rahmi, Yudhi Lestanata, dan Ayatullah Hadi. "Dinamika Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024." *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 1 (2025): 145-150.

Benni Erick dan Masyitah. "Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (2020): 200-212.

- Biroroh, Ta'mirotul, dan Muwahid. Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia. *Jurnal hukum islam* 2, no. 2 (2020): 365–384.
- Budhiatia, Ida, Rian Adhivira Prabowo, dan Edho Rizky Ermansyah. Norma Tanpa Sanksi: Polemik “Kuota Gender” dalam Undang-Undang dan Implikasinya terhadap KPU sebagai *Self-Regulatory Body*. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 1, (2024): 93-113.
- Dewianalisna, Ilmia. “Hak Perempuan dalam Politik: Tinjauan Hukum Keterwakilan Perempuan di Parlemen.” *BPK RI* 2, no. 2 (2022): 1-30.
- Gatot, Edwin Sena Andiana dan Djoni Gunanto. “Analisis Rekrutmen Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Bogor)”. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1 no. 4 (2024): 105–120.
- Hasibuan, H. A. Lawali, dan Alvin Hamzah Nst. “Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki.” *Jurnal Legisia* 15, no. 2 (2023): 136-145.
- Hevriansyah, A. “Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif.” *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 67-85.
- Kolang, Josina E., Fabilio Emiliano Pondaag, dan Audi H. Londa. “Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” *Administratum* 3, no. 5 (2022): 1–18.
- Nabila, Andi Aulia, Fildanasari, dan Arham Alfandi. “Reformasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen melalui Gayatri Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan dalam Ranah Politik.” *Legislatif* 2, no. 2 (2019): 100–112.
- Maghfiroh, Ainiyah Mufidatun, Alif Firdaus Zamzam, Halimur Rosyid, Mahmud Aprian Mabru, dan Midkholus Surur. “Dilema Keterwakilan Perempuan sebagai Calon Anggota Legislatif PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di Kabupaten Lamongan pada Pemilu Tahun 2024.” *Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat*, 16, no. 3 (2024): 384-400.
- Pariadi, Damayanti, G. A. R., & Rifai, A. “Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 3 (2023); 420-429.

Silalahi, Wilma. “Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 71–83.

Sumertana Made, I Nyoman lemes, I Nyoman Gede Remaja. “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumudu) dalam Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Hukum* 9 no. 2 (2021): 25-53.

Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Jurnal MODERAT*, 8, no. 2 (2022): 427-435.

C. Skripsi

Astri Dwi Andini. Pengaturan Keterwakilan Perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif. Tesis (S2), *Universitas Jambi*, 2024.

Mora, A. Analisis Fungsi, Peran, Tugas dan Strategi Humas di Biro Hukum dan Humas Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Skripsi, *Universitas Indonesia*, 2008.

D. Makalah

Ignatius Mulyono. “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan.” Makalah, Diskusi Panel RUU Pemilu – Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat, Jakarta, 2 Februari 2010.

E. Internet

Data Primer.” aharja.ac.id. Diakses 20 Mei 2025. <https://aharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, “DKPP Periksa Ketua KPU Kabupaten Bintan Terkait Keterwakilan Perempuan”, diakses 26 desember 2023 <https://share.google/uLUheXqG0qAzQkShK>

Habi, Nuraida Fitri. “Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan dalam Pemilu Penting?” Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, diakses 6 Januari 2026. <https://fsy.uinjambi.ac.id/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, Tugas dan Kewenangan, diakses 24 Desember 2025 <https://share.google/glbNBXRyMVSEoEmre>

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Profil Calon Legislatif: Apa yang Perlu Diketahui Sobat Pemilih, 10 November 2025, diakses Pada 16 Januari 2026 https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/2026_profil-calon-legislatif-apa-yang-perlu-diketahui-sobat-pemilih

KPU PAPUAPEGUNUNGAN. *Representasi Perempuan di Politik Indonesia: Tantangan dan Upaya Melalui Kebijakan Kuota 30%*. Diakses 8 Januari 2026: <https://share.google/gE3iRAAdSTjja6vvn5>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Posisi Pimpinan AKD DPR*”, Berita MKRI, diakses melalui <https://www.mkri.id> diakses pada 16 Januari 2026.

Mas Alamil Huda, KPU Kalah Gugatan Terkait Kuota Caleg Perempuan,” Republik, tanggal publikasi, <https://share.google/By8mDAFpaiv9P0A7V> diakses 9 Januari 2026 .

Kontroversi Kuota Caleg Peran di Bintan: Gugatan PTUN vs Klaim KPU Sesuai Aturan.” SuaraKepri. diakses 15 Oktober 2025. <https://suarakepri.com/berita/bintan/kontroversi-kuota-caleg-perempuan-di-bintan-gugatan-ptun-vs-klaim-kpu-sesuai-aturan/>

Pengumuman DCS Pemilu 2024 dapat diakses melalui situs resmi KPU infopemilu.kpu.go.id dan laman KPU provinsi/kabupaten/kota, diakses 21 Januari 2026.

Pratiwi Eka Putri. “Tiga Elemen Penentu Kesuksesan Pemilu.” Badan Pengawas Pemilihan Umum, 4 April 2019. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tiga-elemen-penentu-kesuksesan-pemilu>.

Tempo.co, “KPU Disebut Tidak Jalankan Putusan Mahkamah Agung soal Aturan Keterwakilan Perempuan”, *Tempo*, <https://www.tempo.co>, diakses pada 24 Desember 2025.

F. Instrumen Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Keputusan KPU Nomor 203 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bintang dalam Pemilu 2024.

Putusan DKPP Nomor 290-PKE-DKPP.

